BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk negara Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* tahun 2023, menunjukkan jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 237,55 juta jiwa. Jumlah ini merupakan yang terbanyak di kawasan negara-negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), maupun secara global. Populasi muslim di Indonesia tersebut setara 86,7% dari total populasi di Indonesia (Databoks, 2023). Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk dan model dalam ekonomi dan keuangan syariah. Sistem keuangan syariah memiliki misi mewujudkan sistem keuangan yang berlandaskan keadilan, kemanfaatan, kejujuran, kebenaran, keseimbangan, dan anti-kezaliman melalui lembaga perbankan syariah (Soemitra, 2016). Misi ini diharapkan bahwa akan memungkinkan seluruh masyarakat, terutama umat muslim, untuk ikut berkontribusi dalam memperbaiki guncangan ekonomi yang terjadi.

Salah satu upaya yang ditawarkan sektor keuangan sosial Islam dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran Islam, seperti zakat, infaq, hibah, wakaf, shadaqah dan lain-lain (Anjelina *et al.*, 2020). Di dalam Islam terdapat beberapa bentuk lembaga yang salah satunya diharapkan mampu menjadi instrumen pemerataan pendapatan, yaitu wakaf. Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang memiliki peran penting dalam pembangunan peradaban Islam, baik di masa lalu maupun di era modern saat ini. Karena wakaf merupakan salah satu kegiatan yang memiliki banyak manfaat, selain untuk keperluan ibadah namun juga dapat meningkatkan kesejahteraan umum (Ridwan, 2017).

Wakaf di Indonesia lebih banyak dikelola secara manual di mana 72.62 % pemanfaatannya masih untuk masjid dan musala (Kemenag RI, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa banyak yang masih memahami wakaf hanya sebagai

sumbangan untuk pembangunan tempat ibadah atau makam, sementara potensi wakaf dalam menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi belum sepenuhnya tergali.

Pada praktiknya, melekatnya pandangan atau persepsi tertentu mengenai wakaf di Indonesia. Pertama, wakaf mempunyai persepsi bahwa wakaf adalah benda yang tidak bergerak, spesifiknya yaitu tanah. Kedua, dalam kenyataan yang berkembang di kalangan masyarakat, bahwa di atas tanah tersebut dibangun masjid atau sekolah. Ketiga, penggunaannya masih berpatokan dari wasiat pemberi wakaf (*wakif*). Hal itu yang menjadi penyebab utama perkembangan pengelolaan wakaf cukup lambat jika dibandingkan dengan negara-negara yang berpenduduk muslim lainnya yang terbukti menjadikan wakaf sebagai sebuah solusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan menjadikan wakaf uang sebagai salah satu bentuk pengembangan wakaf produktif, sehingga memberikan manfaat yang cukup besar terhadap masyarakat lokal maupun global (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006).

Namun, seiring perkembangan ekonomi dan pembangunan, muncul inovasi baru, terutama dalam sektor ekonomi syariah, yaitu wakaf uang. Dalam konteks wakaf di Indonesia secara khusus, Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa mengenai wakaf tunai (uang) pada tanggal 11 Mei 2002. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah bentuk dukungan pemerintah terhadap fatwa MUI ini. Aturan kemudian diperkuat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pasal 1 Ayat 7 terkait wakaf uang. Wakaf uang pada dasarnya menjadi dana abadi umat yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dakwah dan masyarakat. Wakaf uang ini merupakan wakaf dengan memberikan uang untuk dibelikan atau dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki *wakif* atau program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada *wakif*, baik untuk keperluan sosial maupun produktif/investasi (Fauziyyah, 2020).

Perlu dibedakan antara wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakaf uang merupakan uang yang dikeluarkan oleh *wakif* dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, yang mana hasilnya untuk penerima manfaat wakaf. Ketika *nadzir*

melakukan penghimpunan wakaf uang maka *wakif* akan menyebutkan program pemberdayaan atau peningkatan kesejahteraan umat tetapi, juga bisa disebutkan untuk investasi-investasi lainnya. Uang wakaf yang telah dihimpun oleh *nadzir* kemudian di investasikan baik itu disektor riil atau sektor keuangan. Wakaf uang yang telah dihimpun wajib dijaga nominal pokoknya, dan keuntungan yang di dapatkan dari investasi yang kemudian digunakan untuk kesejahteraan umat (BWI, 2019).

Sedangkan wakaf melalui uang merupakan harta yang dikeluarkan oleh wakif yang berupa benda bergerak yaitu uang kemudian diubah jadi benda tidak bergerak dengan membuat program atau proyek dengan uang tersebut dan hasil dari program tersebut dapat memberikan manfaat bagi banyak orang (BWI, 2019). Ketika memberikan uang tersebut tujuannya harus secara jelas disebutkan oleh wakif dan siapa yang berhak menerinya. Harta benda wakaf yang dihasilkan dari uang yang terkumpul dari *wakif* harus dikelola dengan baik, dikembangkan, serta tidak boleh dijual atau diwariskan kepada orang lain (Mardiah, 2023).

Dengan diperbolehkannya wakaf dalam bentuk uang maka kesempatan untuk berwakaf bagi ummat pun semakin luas. Karena masyarakat dapat berwakaf dengan uang yang sedikit, maka diharapkan seorang muslim dapat ikhlas berwakaf untuk kepentingan umum. Pemerintah terus berusaha mencari cara untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Salah satu langkah nyata yang telah diambil adalah melalui pengembangan dan pengelolaan lembaga keuangan syariah. Maka dari itu, pada tanggal 25 Januari 2021, diluncurkannya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) oleh presiden secara resmi, yang menandai dimulainya perubahan dalam pelaksanaan wakaf yang lebih luas dan modern.

Perkembangan sektor wakaf di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Menurut data dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama tahun 2022, potensi sektor perwakafan di Indonesia, khususnya wakaf uang, diproyeksikan mencapai sekitar 180 triliun rupiah per tahun sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Angka tersebut dirasa cukup rasional mengingat posisi Indonesia merupakan negara

dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Selain itu Indonesia juga pernah dinobatkan sebagai salah satu negara paling dermawan berdasarkan *World Giving Index* tahun 2021. Akan tetapi pada kenyataannya penghimpunan wakaf uang belum mencapai angka potensi yang ada bahkan cenderung jauh. BWI mencatat bahwa perolehan wakaf uang telah mencapai angka 1,7 triliun sampai dengan Februari 2023 dan 1,4 triliun rupiah pada Maret 2022. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan total perolehan wakaf uang selama tiga tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2018 hingga 2021 yang hanya mencapai 855 miliar rupiah. Tetapi hasil ini masih jauh dari potensi yang ada. Dengan potensi wakaf yang begitu besar, penting untuk memastikan bahwa pengelolaannya dilakukan secara efisien dan profesional, sehingga tidak ada kesenjangan antara potensi dan realisasi wakaf.

Wakaf uang yang dioperasikan secara profesional bisa menghasilkan efek pengganda di perekonomian, dari hasil investasi wakaf uang juga bisa disalurkan dalam bentuk bantuan di sektor ekonomi maupun sektor non ekonomi. Efek pengganda yang baik adalah harus memiliki nilai lebih besar daripada satu. Sehingga apabila variabel tersebut berubah, maka akan dapat dilihat seberapa besar pengaruhnya dalam perekonomian. Secara langsung atau tidak langsung hasil ini mampu membentuk pengaruh yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan yang ada (Sulistya *et al.*, 2020).

Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang terus dihadapi sejumlah daerah di Indonesia tidak terkecuali Provinsi Jambi. Belum teratasinya kemiskinan mendorong pemikiran akan perlunya suatu strategi baru penanggulangan kemiskinan yaitu dengan optimalisasi sumber keuangan Islam berupa wakaf. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi umat.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga terkait, tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan pendapatan di Provinsi Jambi masih menjadi masalah serius. Penduduk miskin Provinsi Jambi pada September 2022 tercatat sebanyak 283,83 ribu orang atau meningkat 4,45 ribu dibandingkan Maret 2022, dan meningkat sebesar 3,96 ribu orang dibandingkan September 2021.

Peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi baik di wilayah kota maupun pedesaan. Persentase penduduk miskin di wilayah kota pada September 2022 tercatat sebesar 10,51% atau sedikit meningkat dari 10,50% pada Maret 2022, sementara itu kenaikan yang lebih tinggi terjadi di wilayah pedesaan dengan persentase penduduk miskin sebesar 6,32% meningkat dari 6,19% pada maret 2022, dan pada tahun 2023 perkembangan kondisi angka kemiskinan Provinsi jambi mengalami kenaikan dari 7,62% menjadi 7,7%. (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, 2023). Data tersebut menunjukkan masih banyak penduduk di Provinsi Jambi hidup di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang tinggi di beberapa wilayah Jambi menunjukkan perlunya solusi yang inovatif dan berkelanjutan.

Penulis mengambil objek penelitian di Kota Jambi, karena Kota Jambi merupakan salah satu kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di Provinsi Jambi. Maka dengan banyaknya jumlah penduduk muslim potensi wakaf uang yang dapat dihimpun juga akan banyak, apabila masyarakat Kota Jambi faham akan manfaat dari adanya wakaf uang. Pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk di Kota Jambi mencapai 633.650 jiwa dan 83,34% dari jumlah penduduk atau sebanyak 528.084 jiwa adalah penduduk mayoritas beragama Islam (Wikipedia, 2023). Penghitungan sederhana potensi wakaf uang di Kota Jambi adalah jika 5% dari jumlah penduduk muslim atau sekitar 26.404 jiwa penduduk muslim berwakaf uang sebesar Rp1.000 saja perbulan, maka akan terkumpul dana Rp26.404.000 setiap bulannya atau Rp316.848.000 setiap tahunnya. Selain itu, jika dilihat berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kota Jambi termasuk dalam kategori tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (2023), pencapaian IPM Kota Jambi pada tahun 2023 berada pada 80,15. Kota Jambi menempati kategori tinggi urutan pertama jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi. Dapat diartikan bahwa taraf hidup masyarakat Kota Jambi sudah lebih baik, wawasan masyarakatnya yang luas menerima berbagai perbedaan pendapat serta pembaharuan ilmu.

Dengan latar belakang masyarakat seperti ini maka dapat dianggap Kota Jambi memiliki potensi besar untuk mengembangkan dan memanfaatkan wakaf

sebagai instrument keuangan syariah yang dapat mendukung pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat. Namun sayangnya hal tersebut belum dikembangkan secara optimal khususnya dalam mengatasi kemiskinan. Salah satu upaya yang dilakukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan adalah dengan partisipasi aktif dari pihak non pemerintah dalam hal ini adalah masyarakat. Apabila masyarakat dapat mengkoordinasikan untuk pemberdayaan wakaf dan dikelola dengan baik, hal tersebut dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan.

Berdasarkan asumsi di atas dapat disimpulkan bahwa potensi wakaf uang di Kota Jambi sangatlah besar namun tidak sebanding dengan dana yang terkumpul seperti pada laporan penghimpunan wakaf uang tahun 2020 berikut:

Tabel 1.1 Penerimaan Wakaf Uang Provinsi Jambi Tahun 2020

No	Penerimaan Wakaf Uang	Jumlah
1	Kankemenag Kabupaten Batanghari	Rp. 12.845.000
2	Kankemenag Kabupaten Tebo	Rp. 12.700.000
3	Kankemenag Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Rp. 11.120.000
4	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi	Rp. 10.575.000
5	Kankemenag Kabupaten Muaro Jambi	Rp. 10.450.000
6	Kankemenag Kabupaten Bungo	Rp. 10.360.000
7	Kankemenag Kota Jambi	Rp. 8.410.000
8	Kankemenag Kabupaten Kerinci	Rp. 8.350.000
9	Kankemenag Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Rp. 6.421.000
10	Kankemenag Kabupaten Merangin	Rp. 6.050.000
11	Kankemenag Kabupaten Sarolangun	Rp. 4.000.000
12	Kankemenag Kota Sungai Penuh	Rp. 800.000
	TOTAL	Rp. 102.081.000

Sumber: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi,2020

Berdasarkan informasi tentang penerimaan wakaf uang di Provinsi Jambi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tahun 2020, tercatat bahwa pada periode tersebut berhasil terkumpul dana wakaf sebesar 102.081.000 rupiah. Dana wakaf ini memiliki pengaruh yang lebih luas daripada sekadar manfaat lokal di Provinsi Jambi. Uang yang terkumpul melalui wakaf ini dialokasikan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) pusat untuk digunakan dalam program kemanusiaan di seluruh Indonesia. Keberhasilan penggalangan dana ini sejalan dengan semangat dari Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang diinisiasi pada tanggal 25 Januari 2021. Dana wakaf ini kemudian diserahkan langsung ke BWI pusat, menunjukkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat Jambi dalam berwakaf uang. Antusiasme ini membuka peluang baru dalam pengembangan wakaf uang di Provinsi Jambi. Ini adalah indikasi konkret bahwa masyarakat di Provinsi Jambi semakin menyadari potensi wakaf uang sebagai alat mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Respons yang sangat positif dari masyarakat menjadi pemicu bagi BWI Provinsi Jambi untuk meresmikan program wakaf uang yang lebih besar pada 11 Oktober 2023. Dengan diresmikannya program wakaf uang ini, dimulailah tahapan pelaksanaan wakaf uang di provinsi Jambi. Program ini melibatkan kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia Provinsi Jambi.

Kehadiran program wakaf uang membawa tantangan dan peluang yang signifikan dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf uang di Provinsi Jambi khususnya Kota Jambi yang juga berperan sebagai pusat lembaga wakaf uang di Provinsi Jambi. Data menunjukkan bahwa penerimaan wakaf uang di Kantor Kemenag Kota Jambi tergolong rendah, dengan jumlah hanya mencapai 8.410.000 rupiah. Faktanya masyarakat di wilayah Kota Jambi masih memberikan pilihan dalam berwakaf pada harta benda tidak bergerak berupa asset tanah. Adapun data wakaf tanah beserta jumlah data tanah wakaf yang telah memiliki sertifikat dan data luas tanah wakaf di Kota Jambi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Tanah Wakaf Provinsi Jambi Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Luas (Ha)
1	Kabupaten Merangin	928	166,02
2	Kabupaten Bungo	739	111,52
3	Kota Jambi	715	89,65
4	Kabupaten Tebo	714	100,67
5	Kabupaten Sarolangun	714	173,39
6	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	613	175,39
7	Kabupaten Muaro Jambi	544	46,79
8	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	522	96,55
9	Kabupaten Batanghari	514	58,70
10	Kabupaten Kerinci	475	54,15
11	Kota Sungai Penuh	140	10,96
TOTAL		6.618	1.084,10

Sumber: Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama,2023

Data yang terdapat di atas menunjukkan bahwa untuk wilayah di Provinsi Jambi, Kota Jambi menempati salahsatu kabupaten/kota dengan jumlah *wakif* wakaf tanah terbanyak. Artinya penghimpunan wakaf uang di Kota Jambi masih tertinggal dari penghimpunan wakaf pada harta benda tidak bergerak, terutama yang diperuntukkan pada tempat ibadah dan sarana prasarana pendidikan. Berdasarkan hal tersebut jumlah penghimpunan wakaf uang di wilayah Kota Jambi dapat terus ditingkatkan. Keberadaan program wakaf uang membawa tantangan yang nyata dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayah ini. Meskipun wakaf uang telah dilaksanakan beberapa tahun belakangan ini, namun wakaf uang kurang mendapatkan sambutan yang berarti dari masyarakat dibandingkan wakaf tanah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang besar, potensi dan realisasi dari penghimpunan wakaf uang di Indonesia begitupula provinsi Jambi khususnya Kota Jambi. Angka tersebut menandakan bahwa minat

masyarakat untuk berwakaf uang masih sangat rendah. Tindakan dalam merealisasikan potensi wakaf tunai (uang) berkaitan dengan minat seseorang dalam berwakaf tunai (uang) (Amalia, 2018). Minat merupakan salah satu hal penting dalam mempengaruhi tindakan, karena jika tidak ada minat maka tidak ada hal yang terjadi (Hasbullah *et al.*, 2016). Minat masyarakat muslim dalam berwakaf uang studi di Kota Jambi bisa kita ketahui dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat muslim dalam berwakaf uang.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya seperti penelitian (Suhasti *et al.*, 2022) menunjukkan bahwa variabel persepsi, religiusitas, dan pendapatan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap minat berwakaf uang. Penelitian (Aliawati, 2020) menyebutkan bahwa variabel pendapatan, pendidikan, dan akses media informasi berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang.

Ditinjau dari masalah yang telah dipaparkan diatas serta didukung oleh beberapa penelitian yang relevan, dapat diketahui bahwa rendahnya minat masyarakat untuk mewakafkan uangnya serta besarnya *gap* penerimaan wakaf uang dengan wakaf tanah di Provinsi Jambi khususnya Kota Jambi menjadi persoalan sekaligus salah satu latar belakang diangkatnya masalah ini oleh penulis. Minat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan dari penelitian-penelitian terdahulu menghasilkan hasil yang berbeda. Dengan itu, penulis disini bermaksud melakukan penelitian dalam ruang lingkup yang lebih luas untuk mengetahui konsistensi hasil dari beberapa variabel dengan objek yang berbeda dari sebelumnya.

Penulis memperkirakan keinginan atau minat ini dipengaruhi oleh beberapa variabel atau faktor-faktor tertentu. Dilihat dari faktor-faktor diatas, penulis membatasi penelitian pada lima variabel, yaitu persepsi, akses media informasi, pendapatan, pendidikan, dan religiusitas. Penelitian ini memiliki tujuan yang sangat berkaitan dalam menggali potensi wakaf uang sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat serta untuk meningkatkan wakaf uang yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Muslim Dalam Berwakaf Uang Di Kota Jambi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah persepsi berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat muslim dalam berwakaf uang di Kota Jambi?
2. Apakah akses media informasi berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat muslim dalam berwakaf uang di Kota Jambi?
3. Apakah pendapatan berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat muslim dalam berwakaf uang di Kota Jambi?
4. Apakah pendidikan berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat muslim dalam berwakaf uang di Kota Jambi?
5. Apakah religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat muslim dalam berwakaf uang di Kota Jambi?
6. Apakah persepsi, akses media informasi, pendapatan, pendidikan, dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat muslim dalam berwakaf uang di Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah yang telah dijelaskan maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh persepsi terhadap minat masyarakat muslim dalam berwakaf uang di Kota Jambi.
2. Untuk menganalisis pengaruh akses media informasi terhadap minat masyarakat muslim dalam berwakaf uang di Kota Jambi.
3. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan terhadap minat masyarakat muslim dalam berwakaf uang di Kota Jambi.
4. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap minat masyarakat muslim dalam berwakaf uang di Kota Jambi.
5. Untuk menganalisis pengaruh religiusitas terhadap minat masyarakat muslim dalam berwakaf uang di Kota Jambi.

6. Untuk menganalisis pengaruh persepsi, akses media informasi, pendapatan, pendidikan, dan religiusitas terhadap minat masyarakat muslim dalam berwakaf uang di Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi segala aspek kehidupan masyarakat seperti:

1. Secara Teoritis
 - a. Menjadi salah satu literatur bagi peneliti berikutnya yang membahas terkait dengan wakaf uang.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang akan memberikan wawasan dan pengetahuan untuk strategi pemasaran wakaf sehingga dapat menambah *wakif-wakif* baru serta menjadi sumber perbandingan antara teori yang telah dipelajari dengan praktik yang terjadi.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis tentang hal faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berwakaf dan terkait lebih dalam lagi tentang wakaf uang dan sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama ini.
 - b. Tersedianya informasi mengenai karakteristik responden berdasarkan demografi sosial-ekonominya dan yang berpeluang dalam berwakaf uang.
 - c. Tersedianya informasi mengenai faktor-faktor yang berkontribusi besar dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap wakaf uang sehingga informasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Wakaf Indonesia khususnya lembaga wakaf pengelola wakaf uang dalam menentukan strategi sosialisasi yang efektif bagi masyarakat agar minat masyarakat dalam berwakaf uang dapat terus meningkat.